

PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fahmi Basyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Situbondo

fahmibasyar91@gmail.com

One phenomenon that emerged in the Islamic world in the 20th century is the family law renewal efforts undertaken by countries with Muslim majority. This was done in response to the dynamic development of society life. There are at least three points that is the objective of family law renewal in the Islamic world, as a law unification effort, raising the status of female, and responding to developments and demands to provide solutions to existing problems. A review of Act Number 1 in 1974 "named this law as a form of unification that is unique with respect fully the variation based on religion and belief to God, besides that unification aims to complement what is not regulated by religion, because in that matter, the state has the right to set it in accordance with the developments and the demands. From the aspect of the history of the Islamic family law renewal in South East Asia spearheaded by Malaysia. It is the first country that has been undertaking the renewal effort, with the birth of *Mohammad Marriage Ordinance* Number 5 in 1880 in the countries of the straits.

Kata Kunci: perbandingan pencatatan, perkawinan & perceraian, hukum Islam

Pendahuluan

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum tersebut dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridha dari Allah SWT. (Abdul Manan, 2008, Ed. I Cet. ke-2: 1) Untuk mencapai pada keluarga bahagia dan sejahtera

perlu adanya suatu perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama aturan negara yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut dijelaskan dalam KHI pasal 2 bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah (Ramulyo, 1996: 4).

Mengenai prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: ".....(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Lebih lanjut dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Namun berbeda tentang sah tidaknya suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Malaysia tentang keabsahan perkawinan tergantung pada kecukupan syarat perkawinan sesuai syara’ sebagaimana ketentuan dalam syeksen 11 bahwa;

“Suatu perkawinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah”.

Lebih lanjut tentang pencatatan atau pendaftaran dilangsir dalam Seksyen 34:

“Kesan pendaftaran di sisi undang-undang Tiada apa-apa jua dalam Akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkawinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”.

Yang artinya bahwa didaftarkan atau tidak bukan menjadi masalah yang substantial bagi ketidakabsahan suatu perkawinan, akan tetapi Negara memberikan legalitas hukum ketika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat syahnya perkawinan dalam syara’.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Library Reseach* (penelitian kepustakaan), yang mana dalam

istilah sukidin dikenal Penelitian Laboratorium, karena penelitian kepustakaan merupakan bagian dari penelitian laboratorium. Disebut *Library Reseach* karena fokus peneliti adalah bahasa dan tulisan yang berupa, ensiklopedi hukum islam, jurnal, undang-undang tentang perkawinan dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

Sedangkan pengumpulan data diambil dari sumber data primer berupa Undang-undang No.1 tahun 1974, Akta 303 dan Akta 164, dan data sekunder berupa literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan prosedur pernikahan. Kemudian data-data tersebut dideskripsikan secara *taken forganted* (apa adanya) untuk selanjutnya dianalisa.

Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin diteliti, maka lalu diadakan analisa yang mencakup *editing*, *coding* dan *tabulating*. *Editing* dilakukan untuk mengkoreksi apakah data yang masuk terbebas dari kesalahan tulis, cetak atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat jalannya penulisan Tesis atau dapat mempengaruhi kebenaran kesimpulan. *Coding* dilakukan untuk mengelompokkan dan memberi tanda-tanda khusus pada semua data yang masuk untuk mempermudah mengevaluasi sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. *Tabulating* dilakukan untuk memberikan jawaban-jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah.

Karena penelitian ini berkaitan dengan pemikiran tokoh dan latar belakang yang dilaluinya, maka penulis menggunakan pendekatan historis, yaitu penelitian yang memberikan penekanan pada pemikiran seorang tokoh dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut sehingga segala peristiwa dapat di-

lacak; dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Diskriptif-analitis

Analisa ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data-data yang terkait dengan prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian dalam aturan perundang-undangan Negara dan Hukum Islam yang didapatkan dari penggalian data-data yang diasumsikan sesuai dengan obyek bahasan yang selanjutnya dianalisa. Sementara tehnik pengolahannya menggunakan *content-analysis* (analisa isi) yaitu suatu metode penelitian untuk menciptakan inferensi-inferensi yang dapat ditiru kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. (Suprayogo dan Tobroni, (2001); 71). Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk proses analisa data ilmiah.

Komparatif

Metode yang dipakai ini untuk menganalisa dan kemudian membandingkan aturan perundang-undangan negara dengan hukum islam tentang perkawinan, sehingga Undang-undangan dan hukum islam dalam hal prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian dapat terformulasikan dengan baik.

Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perkawinan menurut penjelasan umum Undang-undang nomor I tahun 1974 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal.

Sehubungan dengan tujuan perkawinan tersebut, Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah (Ramulyo, 1996: 27).

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan no.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UUP No.1 tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan perkawinan sesuai syarat dan ketentuan. Tradisi pencatatan perkawinan, tentu saja merupakan suatu hal yang baru dan asing dalam peraturan keluarga Islam. Para fuqaha selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan dalam kesaksian akad nikah (ijab qabul), tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan di atas kertas. (Nasution, 2009: 336).

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan

kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pendapat lain bahwa pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, didasarkan pada pasal-pasal yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga substansi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, hal ini juga didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik. (Nuruddin & Tarigan, 2004: 131-133).

Undang Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; *pertama*; perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur Undang-Undang (hukum negara). *Kedua*; perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur hukum agama (Darmabrata, 2003: 101).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga Pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang berbunyi “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian suami mampu memberi nafkah isteri dan anak-anaknya dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak anak mereka. (Abullah, 1991: 187).

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri.

Akibat dari perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak – anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka. (Manan, 2006: 445).

Prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

1. **pasal 3** syeksen;

1.1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

1.2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

1.3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

2. **pasal 4** syeksen; “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

3. **pasal 5** syeksen; “Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu”.

4. **pasal 6** syeksen;

4.1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

4.2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- 4.3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - 4.3.1. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - 4.3.2. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - 4.3.3. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - 4.3.4. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - 4.3.5. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - 4.3.6. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
5. **pasal 7** syeksen; Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat dituliskan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. NH, Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
6. **pasal 8** syeksen; Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
7. **pasal 9** syeksen; Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:
 - 7.1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
 - 7.2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Prosedur Pencatatan Perceraian Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang perceraian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 39 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan dapat putus karena: 1). Kematian; 2). Perceraian; 3). Atas Putusan Pengadilan”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUP, yaitu :

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 sebab sebagai berikut: 1). Kematian; 2). Perceraian; 3). Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian suami isteri dapat disebabkan karena:

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- F. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

- G. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- H. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Sedangkan macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari; (Ramulya, 1990).

- A. *Talak Raj'i* yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (Pasal 118 KHI).
- B. *Talak Ba'in* yang dapat dibedakan atas *talak Ba'in shughraa* dan *talak Ba'in kubraa* (Pasal 119 KHI);
- C. *Talak ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa iddah. Adapun jenis *talak ba'in shughraa* dapat berupa:
- D. Talak yang terjadi dalam keadaan qobla al dukhul (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya).
- E. Talak dengan tebusan atau *khuluk*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan (iwadi) kepada suaminya atas persetujuan suami pula. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- F. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak Ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila perkawinan itu setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI).

1. *Talak Sunny*, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI).
2. *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dilarang, karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI).
3. *Talak Li'an* yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, /sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis *talak Li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI)

Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Akta 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah wilayah Persekutuan) 1984

Di Asia tenggara, Malaysia merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dengan Mohammadan Marriage ordinance No.V tahun 1880 di negara-negara selat (Pinang, Melaka, singapore). Dan, undang-undang inilah yang berisi hukum prosedural (pencatatan dan pendaftaran perkawinan dan perceraian). Untuk Negara-Negara Melayu bersekutu (Perak, selangor, negeri sembilan, dan Pahang) adalah registration of Muhammadan Marriages dan Divorces Enactment

1885. Sedangkan untuk negara-negara Melayu tidak bersekutu atau negara-negara bernaung (Kelantan, Trengganu, Perlis, Kedah, Johor) adalah Divorce regulation tahun 1907.

Setelah itu, sama dengan Indonesia, aturan terkait pencatatan ini dimasukkan ke dalam hukum materiil di dalam berbagai akta undang-undang atau enakmen di berbagai Negara bagian di Malaysia termasuk Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (AUKI WP 1984) atau enakmen lainnya.

Beberapa fakta yuridis yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Malaysia terkait dengan aturan pencatatan perkawinan dan sanksi-sanksi yang melingkupinya dapat dilihat sebagaimana pasal berikut:

“ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004 BAHAGIAN IV PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNGAN DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN Seksyen 40. Kesalahan-kesalahan berhubungan dengan akad nikah perkahwinan”.

Satu seseorang yang dengan diketahuinya mengakadnikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakadnikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan; (a) tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh seksyen 19; atau (b) di hadapan selain di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang boleh dipercayai disamping orang yang mengakadnikahkan perkahwinan itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akadnikah atau yang menjalani sesuatu cara akadnikah dengan sesiapa jua berlawanan

dengan mana-mana peruntukan Bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Aturan terkait sanksi dan penalti sebagaimana ditetapkan dalam perundangan di atas faktanya cukup banyak terjadi, pencatatan menjadi sesuatu yang penting bagi hukum Islam di Malaysia, sehingga isu penting selanjutnya adalah kedudukan pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan di Negara Indonesia tidak diakui keabsahannya di depan Negara, meski secara agama sah. Sementara Hukum keluarga di Malaysia tidak menjadikan pencatatan, istilah dalam *enakmen* mereka adalah pendaftaran, sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum Negara. HKI di Malaysia benar-benar menetapkan syariat sebagai penentu tunggal keabsahan sebuah perkawinan. Jadi, sah atau tidaknya sebuah perkahwinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun syarat sebuah perkawinan menurut fiqih munakahat dalam Islam. Bahkan, Undang-undang di Malaysia menegaskan bahwa tidak diperkenankan menganggap sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum Negara hanya karena tidak didaftarkan.

“Kesan pendaftaran di sisi undang-undang Tiada apa-apa jua dalam Akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”.

Prosedur permulaan bagi perkahwinan ialah persiapan awal yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang akan berkahwin menurut Akta 164 dalam sesebuah perkahwinan sivil. Peruntukan

yang berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi permulaan perkahwinan ialah: mengikut Seksyen 14 hingga seksyen 20 Akta 164 sebagai berikut; (Isni Bustami, 1999: 108) 1). Pemberitahuan kepada Pendaftar perkahwinan ; 2). Penyiaran Salinan Notis; 3). Akuan Bertulis; 4). Upacara Perkahwinan; 5). Kaveat atau Bantahan terhadap perkahwinan.

Jika perkahwinan yang dicadangkan itu tiada sebarang bantahan atau tentangan daripada mana-mana pihak, perkahwinan itu hendaklah diupacarakan sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 22 hingga seksyen 26 yang memperuntukkan bagaimana sesuatu perkahwinan diupacarakan mengikut kehendak Akta 164 sama ada ia adalah perkahwinan sivil, perkahwinan mengikut agama atau adat istiadat yang berlaku. (H.M. Atho' Muzdhar, 2003: 48)

Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkahwinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia:

- A. Kursus Pra Perkahwinan Modul Bersepadu Kursus Pra Perkahwinan Islam (MBKPPI). Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk hendaklah memastikan pasangan bagi warganegara Malaysia yang mengemukakan permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran berkahwin telah menghadiri dan memiliki Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI.
- B. Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin
- C. Pengesahan Permohonan Berkahwin
- D. Penolong Pendaftar hendaklah memastikan pemohon yang membuat permohonan kebenaran berkahwin adalah tinggal atau bermastautin di kawasan kariahnya.

- E. Penolong Pendaftar hendaklah memastikan permohonan untuk berkahwin menggunakan borang yang ditetapkan.
- F. Penolong Pendaftar hendaklah memastikan borang permohonan di isi dengan lengkap oleh pemohon
- G. Penolong Pendaftar hendaklah memastikan borang permohonan kebenaran berkahwin dilampirkan bersama dokumen-dokumen berkaitan seperti berikut:
- H. Salinan Sijil Kelahiran.
- I. Salinan Kad Pengenalan.
- J. Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI
- K. Surat akuan teruna yang dikeluarkan oleh majikannya atau surat akuan sumpah teruna sekiranya beliau tidak mempunyai majikan jika pemohon seorang lelaki.
- L. Surat perakuan cerai jika pemohon bercerai hidup.
- M. Surat perakuan mati jika pemohon bercerai mati.
- N. Surat akuan memeluk agama Islam jika saudara baru.
- O. Surat kebenaran daripada Jabatan polis jika pemohon anggota polis.
- P. Surat kebenaran dari angkatan Tentera jika pemohon anggota tentera.

Setelah berpuashati Penolong Pendaftar hendaklah mengesahkan status pemohon di dalam ruang yang disediakan dalam borang permohonan perkahwinan berkenaan; Kebenaran Permohonan Berkahwin

- A. Pendaftar hendaklah menerima permohonan yang telah disahkan oleh penolong pendaftar kecuali bagi sub peraturan (iii)
- B. Pendaftar hendaklah memastikan borang perkahwinan diterima selewatnya tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan yang dicadangkan.
- C. Pendaftar boleh menerima borang permohonan perkahwinan bagi kes-kes tertentu.
- D. Setelah berpuas hati Pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran

berkahwin melalui catatan dalam borang permohonan bagi perkahwinan dalam negeri. Manakala bagi permohonan perkahwinan luar negeri dan tempat lain dikeluarkan melalui surat kebenaran.

Proses Permohonan Perkahwinan Yang Memerlukan Kebenaran Mahkamah Pendaftar hendaklah memastikan kes-kes berikut dirujuk kepada Mahkamah apabila:

1. Perempuan tidak mempunyai wali nasab atau wali enggan
2. Pasangan atau salah seorang kepada perkahwinan itu masih dibawah umur.
3. Perkahwinan itu secara poligami.
4. Perempuan yang bercerai dan belum disetubuhi oleh suami (jika perkahwinan itu dalam tempoh iddah perceraian biasa).
5. Pendaftar hendaklah menyemak permohonan tersebut sebelum dikemukakan ke Mahkamah.
6. Setelah berpuas hati terhadap borang permohonan berkahwin dan dokumen-dokumen yang dilampirkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat dan laporan kepada Pendaftar Mahkamah melalui pemohon.
 - 6.1. Pendaftar hendaklah menguruskan perkahwinan setelah mendapat kebenaran daripada Mahkamah.
 - 6.2. Tempoh Sah Kebenaran Berkahwin Pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran kahwin bagi tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh dikeluarkan.
 - 6.3. Pendaftar boleh dengan permohonan melanjutkan tempoh sah kebenaran berkahwin selama sembilan puluh (90) hari lagi bagi kes-kes tertentu.
 - 6.4. Pendaftar hendaklah memastikan bahawa kebenaran berkahwin lanjutan dibuat dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh tamat kebenaran berkahwin kali pertama.
 - 6.5. Pendaftar hendaklah memastikan permohonan lanjutan kebenaran berkahwin dibuat di pejabat Pen-

daftar di mana kebenaran asal dikeluarkan.

- 6.6. Pendaftar hanya boleh menerima permohonan kebenaran berkahwin yang baru setelah tamat tempoh lanjutan kebenaran berkahwin.
- 6.7. Kebenaran Berkahwin Dengan Warga Asing Perkahwinan Warganegara Malaysia Dengan Warganegara Asing di Malaysia.

Prosedur Pencatatan Perceraian Menurut Akta 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah wilayah Persekutuan) 1984

Proses atau langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut: *pertama*; mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. *Kedua*; pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak oleh pengadilan dan mengusahakan pengadilan. *Ketiga*; putusan.

Hal-hal lain yang penting dicatat tentang proses perceraian adalah; *pertama*; ikrar talak (perceraian) harus di depan pengadilan. *Kedua*; perceraian harus didaftarkan, dan perceraian yang diakui hanyalah perkahwinan yang sudah didaftarkan. Perceraian sebab *li'an* tidak ada penjelasan lebih rinci, hanya disebutkan agar Pengadilan merekam perceraian dengan *li'an*. Sebagai tambahan, semua undang-undang di Malaysia mencantumkan "murtad" sebagai alasan perceraian. Tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perceraian, melainkan dengan putusan hakim, Kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa jua dalam Akta ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali:

- A. Jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Akta ini; atau

- B. Jika perkahwinan itu telah dilangsungkan mengikut Hukum Syara'; dan
- C. Jika pemastautinan salah satu pihak kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Wilayah Persekutuan.

Prosedur pencatatan perceraian di Negara Malaysia diatur dalam seksyen 47 Perceraian dengan talaq atau dengan perintah, sebagai berikut:

- A. Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan mengandungi.
- B. Butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu;
- C. Butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidangkuasa kepada Mahkamah di bawah seksyen 45;
- D. Butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal-ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat prosiding itu;
- E. Suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;
- F. Suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan, jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;
- G. Syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau, jika tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itu; dan Butir-butir mengenai perintah yang diminta.
- H. Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah hendaklah

menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah untuk membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.

- I. Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan Mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah pecahbelah dengan tak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah.
- J. Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- K. Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujuk kes itu kepada jawatankuasa itu.
- L. Pada melantik dua orang itu di bawah subseksyen (5), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
- M. Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.

- N. Jika jawatankuasa itu tidak dapat ber-setuju atau jika Mahkamah tidak berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah boleh memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain bagi menggantikannya.
- O. Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.
- P. Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa.
- Q. Jika jawatan kuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan hal-hal lain berhubungan dengan perkahwinan itu. (Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan): 1984)

Kesimpulan

Prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas

resmi pencatatan perkawinan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia, Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa Undang Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; pertama perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara), kedua undang-undang juga menitik beratkan sahnya suatu perkawinan pada prinsip-prinsip hukum agama. Artinya, kalau perkawinan hanya dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum agama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 11 mengatur bahwa sesaat setelah dilaksanakannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10, Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Begitu juga di Negara Malaysia Prosedur Pencatatan perkawinan suatu hal yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Akta 303 seksyen 25 akan tetapi kewajiban pencatatan itu tidak menghilangkan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan secara Agama Islam. Negara-negara bagian Malaysia mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan perkawinan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan tentang prosedur pencatatan perkawinan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, kita ketahui bahwa Negara Malaysia adalah Negara Federal, maka di setiap wilayah dalam Negara Malaysia (dalam hal ini adalah Negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk pengajuan perkawinan dan perceraian, sedangkan di Negara Indonesia prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian berlaku secara merata.

Kemudian dalam hal “penalti dan pelbagai peruntukan berhubungan dengan akad nikah dan pendaftaran perkawinan tidak hadir di hadapan pendaftar dalam masa yang ditetapkan”. Jika seseorang yang dikehendaki oleh seksyen 31 hadir di hadapan seorang Pendaftar tidak berbuat demikian dalam masa yang ditetapkan, maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. sedangkan di Negara Indonesia mempalai laki-laki yang diharuskan hadir dihadapan petugas pencatatan perkawinan dan perceraian sedangkan mempelai perempuan tidak harus.

Daftar Pustaka

- Abullah, A. G. (1991). *Himpunan perundangan dan peraturan peradilan agama*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan): 1984
- Bustami, I. (1999). *Perkawinan dan perceraian dalam Islam*. Padang : IAIN IB Press.
- Dahlan, D. (2003). *“Putusnya perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW); tinjauan hukum Islam”*. Jakarta: PT. Kartika Insan Lestari.
- Hariati Azizan, *“Child marriages on the rise,”* dalam http://www.academia.edu/249293/input_isu-gender_terhadap_hukum_islam_s emasa (diakses pada tanggal 6 Oktober 2013).
- <http://www.theborneopost.com/2010/04/06/pasangan-kahwin-di-luar-negara-tanpa-kebenaran-bertulis-didenda-rm500/#ixzz2kU2GXjz9> (diakses pada tanggal 13 Nopember 2013).
- Manan, A. (2006). *Penerapan hukum acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muzdhar, A. (2003). *“Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta : Ciputat Press.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perdata keluarga Islam dan perbandingan hukum perkawinan di negara muslim*. Yogyakarta: Akademia Tazzafa.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. K. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi penelitian sosial-agama*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh munakahat perbandingan (dari tekstual sampai legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.